



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



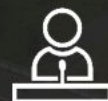
PROFIL INDUSTRI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE



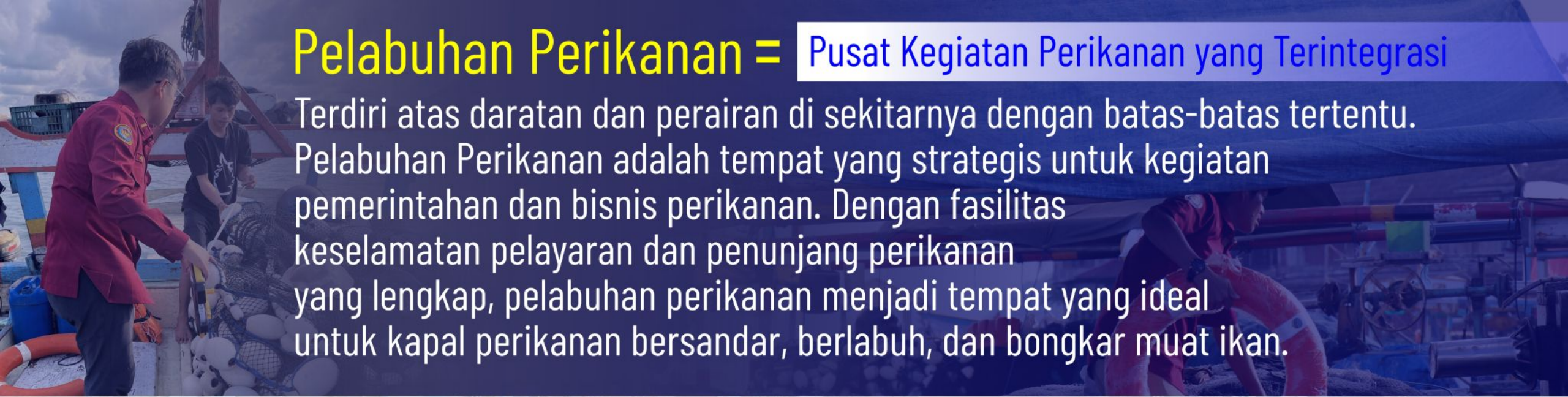
Tanggal
28 April 2026



Tempat
Ternate



Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
(Kamarudin, S.Pi, M.Si)



Pelabuhan Perikanan = Pusat Kegiatan Perikanan yang Terintegrasi

Terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang strategis untuk kegiatan pemerintahan dan bisnis perikanan. Dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang perikanan yang lengkap, pelabuhan perikanan menjadi tempat yang ideal untuk kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan.



Dua Fungsi Utama Pelabuhan Perikanan

❶ Fungsi Pemerintahan

Mengelola dan mengawasi kegiatan perikanan untuk memastikan keselamatan operasional kapal perikanan dan keberlanjutan sumberdaya ikan.

❷ Fungsi Pengusahaan

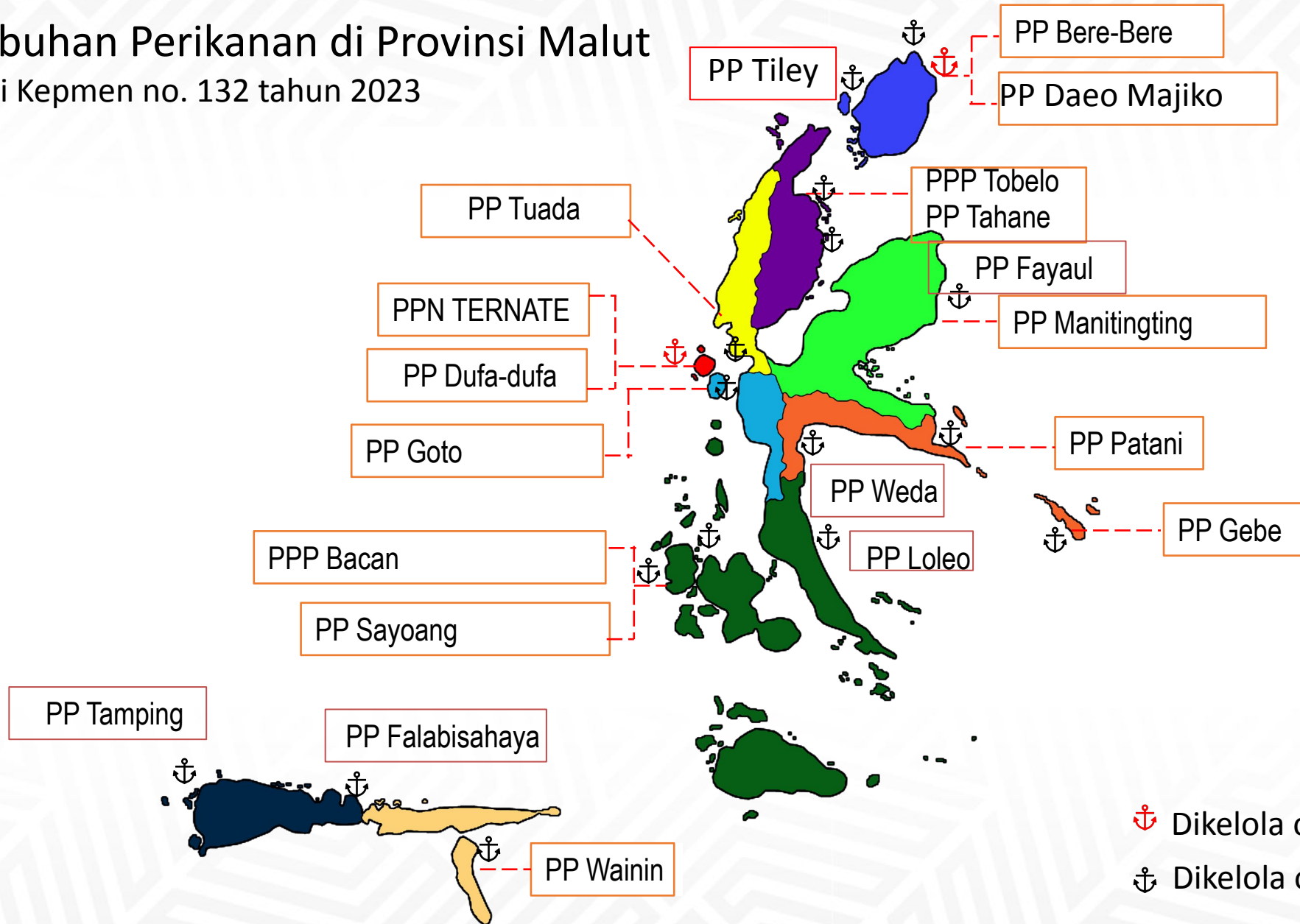
Menyediakan layanan dan fasilitas untuk mendukung kegiatan bisnis perikanan, seperti bongkar muat ikan, Logistik, Pemasaran dan distribusi ikan serta penyediaan fasilitas penunjang.

Dengan demikian, Pelabuhan Perikanan menjadi pusat kegiatan perikanan yang terintegrasi, mendukung keberlanjutan sumberdaya ikan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.



Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku

Sesuai Kepmen no. 132 tahun 2023



⚓ Dikelola oleh KKP
⚓ Dikelola oleh Pemda



Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

1978 

Dibangun sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (type C). Dengan berbagai Sarana dasar, sarana fungsional dan sarana penunjang.

2001 

Dinaikan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (type B) Pada tahun 2001.

STRUKTUR ORGANISASI

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

TAHUN 2025



KEPALA PELABUHAN
Kamarudin S.Pi, M.Si



TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
Edi Kurniawan S.Pi (Kasubbag Umum)

1. Ade Irma Sangadji, S.Pi (Analisis BMN)
2. Nurhayati, S.Pi (Pengelola BMN)
3. Risma Saleh (Pengelola Kepegawaian)
4. Hamdan Hadi (Pengadministrasi Persuratan)
5. Nurkalam AS A, Md (Pranata Keuangan APBN Mahir)
6. Hangga Agung Bramantyo, S.IP (Analisis SDM Aparatur Pertama)
7. Febriyanto Eka Prayoga, SE (APK APBN Pertama)
8. Nabila Almas Afina, A.Md.I.Kom (Pranata SDM Aparatur Terampil)
9. Intan Wulansari, A.Md (Arsiparis Terampil)
10. Barmawi Hasbullah S.Pi (APK APBN Muda)
11. Sandi Setiadi (Prakom Ahli Pertama - PPPK)

12. Lukman Umasangadji, S.Pi (Analisis Perencanaan/ Penelaah teknis Kebijakan)
13. Tri Mentari Septiani Djafar (Arsiparis Pertama - PPPK)
14. Ika Windasari, SM (Pengelola Keuangan)
15. Ikbal Abdullah, A.Md.Kom (Pengelola Layanan Operasional - PPPK)
16. Nursanti S. Abdulkadir, SE (Penata Layanan Operasional - PPPK)
17. Nursida A. Rajak (Pengadministrasi Perkantoran - PPPK)
18. Randi Abd Latif (Operator Layanan Operasional - PPPK)

TIM KERJA OPERASIONAL PELABUHAN
Heru Ali Fadjar, S.Pi (P3T Muda)

1. Nurlaela, S.Pi (Pengelola Data)
2. Angga Nugraha, S.ST.Pi (P3T Muda)
3. Mahli Aweng, S.Pi (Analisis Mutu Hasil Perikanan)
4. Nur Tuharea (AP3T Terampil)
5. Dedy Harun (Pengelola Data)
6. Kartini Muhammad (P3T Pertama - PPPK)
7. Abram Barata (P3T Pertama - PPPK)
8. Suleman Robo (AP3T Terampil - PPPK)
9. Suaib Umar (AP3T Pemula - PPPK)
10. Siti Amina Balega (AP3T Pemula - PPPK)
11. Nasrun Kadir (Operator Layanan Operasional - PPPK)



TIM KERJA KESYAHBANDARAN
Dhian Wahyudi, S.ST.Pi. (P3T Muda)

1. Sulfiarini S.Pi (P3T Muda)
2. Mahmud Saleh (Pengelola Kesyahbandaran)
3. Nurain Sulistyawaty (Analisis Kesyahbandaran)
4. Nulfawan F.S Pobela, A.Md (Syahbandar Pelabuhan Perikanan)
5. Oktafianus L. Tuegeh, A.Md (AP3T Mahir)
6. Hilman Zulfikar (AP3T Terampil)
7. Gellen Nendo Perdana (AP3T Terampil)
8. Riswan Naser (AP3T Terampil - PPPK)
9. Danang Tri Asmoro (P3T Pertama)
10. Lily Diane Sompotan (AP3T Pemula - PPPK)
11. Randy Prayoga, S.S.T.Pi (P3T pertama - PPPK)
12. Handriko Ridwan, A.Md.Pi (AP3T terampil - PPPK)
13. Rofiqul Umam Ahmad, S.Tr.Pi. (Penata kelola kelautan dan perikanan)
14. Fitria Ismail, S.Pi (P3T Pertama - PPPK)
15. Yusup Salampessy (Operator Layanan Operasional - PPPK)
16. Dedi Putrayana (Operator Layanan Operasional - PPPK)



TIM KERJA TKPU
Angga Nugraha, S.ST.Pi (P3T Muda)

1. Rustam H. Obu, S.Pi (Analisis Pengembangan Sarpras)
2. M. Yusran Djafar (Pengelola Sarpras)
3. Sudiwanto Suminta (Pengelola Sarpras)
4. M. Yusuf Ardiansyah S.Pi (P3T Pertama)
5. Muhammad Rifan Pratama (AP3T Pemula - PPPK)
6. Josef Rudolf Dendeng (AP3T Pemula - PPPK)
7. Nurvira Mardia Hamidu (Operator Layanan Operasional - PPPK)
8. Ari Guswally Tanjung (Penata Layanan Operasional - PPPK)
9. Alfison Kaimudin Havidz (Penata Layanan Operasional - PPPK)
10. Tambrin Hasan (Operator Layanan Operasional - PPPK)
11. Muhdar Habel (AP3T Pemula - PPPK)
12. Jokosantoso Temu (Operator Layanan Operasional - PPPK)
13. Risnan Jono, A.Md.Pi. (AP3T Terampil - PPPK)
14. M. Rahmat S. Sonodihardjo (Operator Layanan Operasional - PPPK)
15. Widayanti (Penata Layanan Operasional - PPPK)
16. Halid Abdullah (Operator Layanan Operasional - PPPK)
17. Muslim Koroy (Operator Layanan Operasional - PPPK)
18. Ari B. Mustafa (Operator Layanan Operasional - PPPK)
19. Suhaimi Abdullah (Operator Layanan Operasional - PPPK)
20. Risdianto Asky (Operator Layanan Operasional - PPPK)

KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2025

TOTAL PEGAWAI

99



PNS

31

PPPK

29

PPPK
PARUH WAKTU

7

OUTSOURCING
PJLP

10

OUTSOURCING
PIHAK KE 3

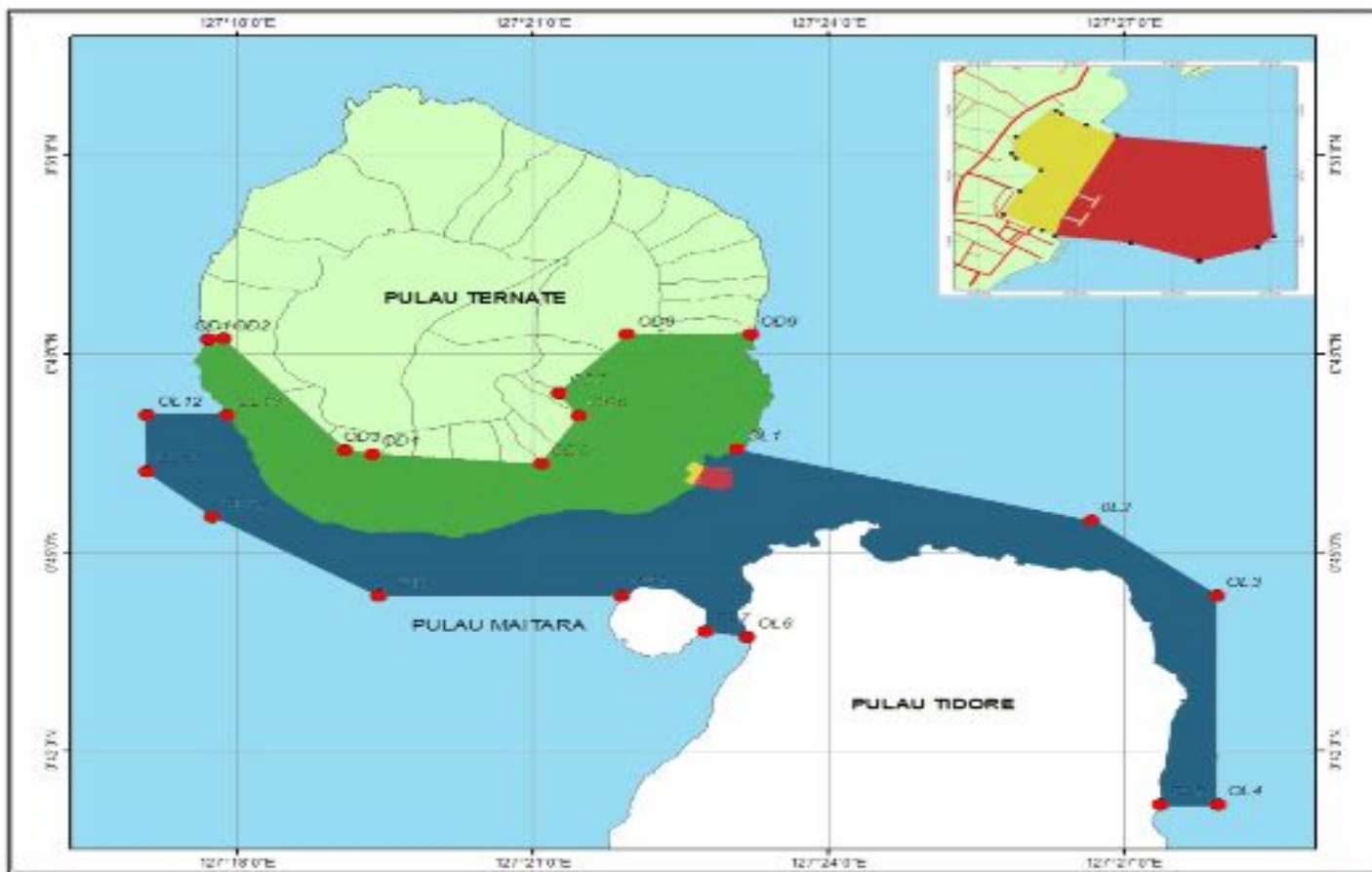
22





PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor KEP. 63/MEN/2011
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate.



Keterangan :

-  : Wilayah Kerja daratan
-  : Wilayah kerja perairan
-  : Wilayah Pengoperasian daratan
-  : Wilayah pengoperasian perairan



Skala :

1 : 50.000

WKOPP
PPN Ternate

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf



KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUT
Nomor: B.690/MEN-KP/VIII/2022

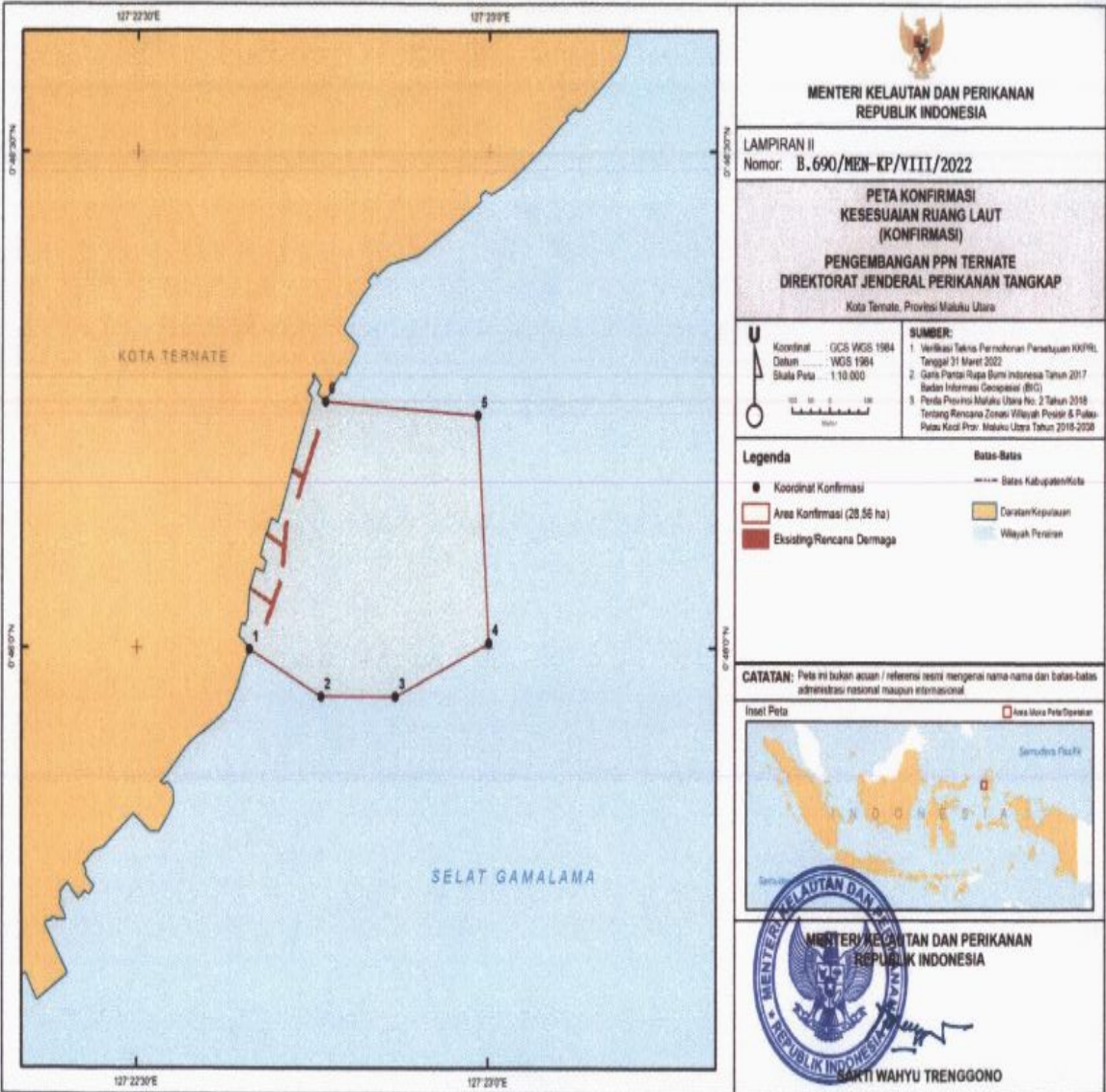
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut kepada:

- Nama : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Nomor Pokok Wajib Pajak : 00.173.185.0-025.000
Alamat : Gedung Mina Bahari II, Lt. 2,
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Gambir, DKI Jakarta
- Nomor Telepon Seluler : 0812 9106 2982
Nomor Telepon/Faksimili : (021) 3519070
Alamat Surat Elektronik : djpt@kcp.go.id
Status Penanaman Modal : -
Lokasi yang Disetujui : -
a. Provinsi : Maluku
b. Nama Perairan : Selat Gamalama
Jenis Kegiatan : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Ternate
Luas : 28,56 hektar

Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan menjadi acuan untuk memperoleh perizinan lainnya. Dalam hal perizinan lainnya belum diterbitkan, maka Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Daftar koordinat, peta, serta hak dan kewajiban sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut ini.

Diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 05 Agustus 2022



**KKRL
PPN Ternate**



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Mawar Komp. Pohon Pala ☎ 0921 – 3122042, Fax 0921 - 3122042
TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03/KEP-KELAYAKAN/BLH-MU/10/09

TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
TERNATE
DI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
OLEH PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku Utara terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate oleh Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dapat disetujui sesuai hasil rapat Komisi AMDAL Provinsi Maluku Utara tanggal 13 Oktober 2009;
 2. bahwa atas pertimbangan pada butir 1 tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate oleh Pelabuhan Perikanan Ternate di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

Kelayakan Lingkungan PPN Ternate

KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 22 Oktober 2009


Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku Utara
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
H. H. M. Natsir Thaib
Pembina Utama Madya
NIP. 19550410.198403.1.009

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
2. Kepala PPLH Regional Sumapapua di Makassar
3. Kepala BLH Kota Ternate di Ternate



Pelayanan Publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sesuai Kepmen KP. No. 20 Tahun 2025

1. Penerbitan Persetujuan Berlayar
2. Penerbitan Surat Tanda Bukti Kedatangan Kapal Perikanan
3. Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan
4. Aktivasi E-Logbook Penangkapan Ikan
5. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
6. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
7. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
8. Pemakaian Listrik di Kawasan Pelabuhan Perikanan
9. Pengadaan Es
10. Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
11. Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
12. Bengkel
13. Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan
14. Kebersihan di Kawasan Kolam Pelabuhan
15. Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan
16. Penggunaan Transportasi
17. Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer dan Cold Storage
18. Pengadaan Air
19. Pas Masuk





Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



KETERSEDIAAN FASILITAS PPN TERNATE



Master Plan PPN Ternate



Legenda

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 01. Gerbang Utara & Selatan | 13. Depot Es |
| 02. Pos Jaga | 14. Taman PPN |
| 03. Gudang Arsip | 15. Kantor Utama PPN |
| 04. Garasi Kendaraan | 16. Balai Pertemuan Nelayan |
| 05. Rumah Genset | 17. Kantin |
| 06. Lapangan Tennis | 18. Area parkir Kendaraan |
| 07. Gardu PLN | 19. Tempat Pemasaran Ikan |
| 08. Pegadaian | 20. Tempat Penumpukan Box Ikan |
| 09. Bengkel | 21. TPI Higienis |
| 10. WC Umum | 22. Gedung Pelayanan Terpadu |
| 11. Kios Sembako | 23. Gedung LPPMHP |
| 12. Rm. Dinas Lab. Provinsi | 24. Rumah Dinas Kelabu |

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 25. Rumah Dinas Jabatan | 37. Pabrik Es PPN |
| 26. Mes Pengawasan | 38. Pengasapan Ikan |
| 27. Mes Operator | 39. Kantor Pengawasan PPN |
| 28. Rumah Dinas | 40. SPBUN PPN |
| 29. Pabrik Es Swasta | 41. Shelter Nelayan |
| 30. ABF & Cold Storge PPN | 42. Bak Penampungan Air |
| 31. Gudang Pengemasan Ikan | 43. Mini Plan/Gudang |
| 32. Kios Dagang | 44. Gudang K3 |
| 33. Gdg. Penampung Ikan (Swasta) | 45. ABF & Cold Storge Swasta |
| 34. Gdg. Pengelolah Ikan (Swasta) | 46. Dermaga 1 |
| 35. Pos Tambat Labu PPN | 47. Dermaga 2 |
| 36. Gdg. Peralatan | 48. RENC. Dermaga |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 49. RENC. TPI (Pelelangan Ikan) | 61. RENC. ABF dan Coldstorage (Swasta) |
| 50. RENC. Air Bersih dan IPAL | 62. Fish Mart dan RENC. Pabrik Es |
| 51. RENC. Kantor Utama | 63. RENC. Toko Nelayan |
| 52. Masjid Mina Maritim | 64. RENC. Pengolahan dan Pemasaran |
| 53. Area Wisata Bahari | 65. RENC. Pengemasan Ikan dan Gudang Peralatan Penangkapan Ikan |
| 54. Galangan Kapal Swasta | 66. RENC. Penampungan dan Pengemasan Ikan |
| 55. RENC. Slip Way | |
| 56. Ruang Terbuka Hijau | |
| 57. Dive Center | |
| 58. Pengolahan Ikan Swasta | |
| 59. RENC. Lahan Industri | |
| 60. TPS (Sampah) | |



Fasilitas Pokok PPN Ternate

No	Jenis Fasilitas	Luas/Panjang
1	Lahan I	40000 m ²
2	Lahan II	60606 m ²
3	Lahan Sumur Bor	1027 m ²
4	Dermaga I	154 m
5	Dermaga II	133 m
6	Dermaga TPI	49 m
7	Talud	497 m
8	Jalan Komplek	2834 m
9	Pagar Keliling	1107 m



Aset Tanah PPN Ternate

Tanah 2

- Jenis BMN: Tanah
- Kode: 2010104001
- NUP: 3
- Luas Aset: 60.606 m²

Tanah 1

- Jenis BMN: Tanah
- Kode: 2010104001
- NUP: 1
- Luas Aset: 40.000 m²





1,77

Ha Total Lahan, Tersedia Untuk
Investasi Industri Perikanan

Rekomendasi Jenis Usaha

Berdasarkan Area dan Master Plan

Area A

1. Industri Perbengkelan
2. Penjualan Bahan dan Alat Tangkap
3. Toko Sembako atau Toko Produk Olahan Perikanan
4. Docking Kapal

Area B

- a. Toko Produk Olahan Perikanan
- b. Penjualan Bahan dan Alat Tangkap
- c. Kios/Toko Sembako

Area C

1. Penampungan dan Pengemasan Ikan
2. Pengasapan Ikan

Area D

1. Unit Pengolahan Ikan
2. Integrated Cold Storage (ICS) atau Pabrik Es
3. Penampungan Ikan

Area E,F dan G

1. Unit Pengolahan Ikan
2. Industri Pengalengan Ikan
3. Integrated Cold Storage (ICS)

Persyaratan Sewa Tanah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

1. Pelaku usaha melakukan permohonan sewa kepada Kepala PPN Ternate dengan menyampaikan formulir permohonan.
2. Melengkapi dokumen persyaratan:
 - a. KTP, NPWP
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c. Akta Pendirian
 - d. Layout Pengembangan Bangunan Gedung
 - e. Surat pernyataan dan pakta integritas
 - f. Proposal Rencana Usaha

Prosedur Permohonan Sewa Tanah/Bangunan:

1. Mitra usaha (Perorangan/PT/Koperasi/BUMN/D) mengajukan permohonan kepada Kepala PPN Ternate.
2. UPT Satker akan melakukan verifikasi dan identifikasi permohonan sewa serta menyampaikan usulan sewa ke Eselon I DJPT.
3. KPB Eselon I DJPT akan menelaah permohonan dan objek sewa serta menyampaikan usulan persetujuan sewa kepada Pengguna Barang (Biro Keuangan KKP).
4. Pengguna Barang (Biro Keuangan KKP) akan meneliti permohonan sewa dan menyampaikan usulan persetujuan sewa kepada Pengelola BMN (Kementerian Keuangan).
5. Kemenkeu melalui KPKNL setempat akan meneliti permohonan, melakukan penilaian objek sewa, dan menentukan besaran sewa serta menerbitkan surat persetujuan sewa.
6. Pengguna Barang (Biro Keuangan KKP) menerbitkan SK Pemanfaatan BMN cara sewa berdasarkan surat persetujuan sewa dari KPKNL dan akan menyampaikan ke Satker.
7. Mitra Usaha melakukan tanda tangan surat perjanjian/kontrak paling lama 3 bulan setelah surat persetujuan sewa terbit.



Estimasi Tarif Sewa Tanah/Bangunan di PPN Ternate

(Berdasarkan persetujuan KPKNL tahun 2025)

Estimasi Tarif Sewa Tanah (per m2/tahun)	Estimasi Tarif Sewa Bangunan (per m2/tahun)
● Perusahaan/Badan Usaha (100%) Rp. 45.000 - Rp. 62.000 ● Koperasi (50%) Rp. 28.000 - Rp. 42.000 ● Perorangan UMKM/Skala Kecil (25%) Rp. 13.500 - Rp. 22.000	● Perusahaan/Badan Usaha (100%) 4x Tarif Perorangan (*belum ada persetujuan bangunan yang disewa Perusahaan) ● Koperasi (50%) 2x Tarif Perorangan ● Perorangan UMKM/Skala Kecil (25%) ± Rp. 55.000

****Note:** Tarif fix akan ditentukan tim penilai KPKNL setelah dilakukan penilaian. Umumnya tarif fix akan bergantung pada luasan dan kondisi aset yang disewa, periodesitas, dan skala usaha.

**Dasar Hukum: PP. No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD,*

PMK No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN

Fasilitas Fungsional PPN Ternate

No	Fasilitas	Luas/Kapasitas
1	Kantor Utama	416 m²
2	Kantor Pelayanan Satu Atap	400 m²
3	Bengkel	200 m²
4	Pabrik Es Balok	10 Ton
5	Cold Storage	4 Unit (Total 310 Ton)
6	Air Blast Frezer	6 Unit (Total 17 Ton)
7	Daya Listrik	375KVA
8	Genset	4 Unit (150 KVA, 200 KVA, 130 KVA, 40 KVA)
9	Tanki Air	150 Ton
10	Area Parkir	544 m²
11	DII.	





Fasilitas Rantai Dingin di PPN Ternate

Rantai dingin		Unit	Total Kapasitas (Ton)
PPN Ternate	Cold Storage	4	310
Swasta	Cold Storage	9	460
Total Unit dan Kapasitas CS di PPN Ternate		13	770
PPN Ternate	ABF	6	17
Swasta	ABF	10	28
Total Unit dan Kapasitas ABF di PPN Ternate		16	45
PPN Ternate	Pabrik Es	1	5
Swasta	Pabrik Es	3	80
Total Unit dan Kapasitas Pabrik Es di PPN Ternate		5	95





Fasilitas Rantai Dingin di PPN Ternate

No	Pengelola		Coldstorage		ABF		Pabrik Es	
	Pemerintah/Swasta	Nama Pengelola	Unit	Kapasitas (Ton)	Unit	Kapasitas (Ton)	Unit	Kapasitas (Ton)
1	Pemerintah	PPN Ternate	4	310	6	17	1	5
2	Swasta	CV. Mitra Tuna Mandiri	-	-	2	6	-	-
3	Swasta	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	3	140	1	2	2	20
4	Swasta	PT. Kelola Mina Samudra	2	60	3	9	-	-
5	Swasta	CV. Tama Arta Nusantara	1	80	-	-	1	50
6	Swasta	PT. Dwi Poli Perkasa	1	50	1	3	-	-
7	Swasta	PT. Mitra Nelayan Mandiri	1	80	2	6	-	-
8	Swasta	PT. Fishindo Lintas Samudera	1	50	1	2	-	-
9	Swasta	Fahri Ismail	-	-	-	-	1	20
Total			13	770	16	45	4	85



Terdapat SPBUN yang dikelola oleh Koperasi dengan Kuota BBM sebesar 55 KL perbulan;



Sumber dari PDAM dan Sumur Bor

- a. Debit Air Sumur Bor sebesar 1,5 L/detik;
- b. Tangki Penampungan sebanyak 2 Unit (100 M^3 dan 50 M^3)

Alokasi Daya Listrik untuk Kawasan PPN Ternate dari PLN sebesar 2 MW dengan Daya yang sudah terpakai sebesar 1.25 MW terdiri dari :

- ☐ Fasilitas PPN Ternate sebesar 375 KVA
- ☐ Fasilitas swasta sebesar 990 KVA
- ☐ Genset sebanyak 3 Unit ; 175 KVA, 200 KVA, 40 KVA.





Fasilitas Penunjang PPN Ternate

No	Fasilitas	Luas/Jumlah
1	Rumah Dinas	11 Unit
2	Masjid	525 m ²
3	Gudang K5	48 m ²
4	Tempat Sampah Sementara	12,9 m ²
5	Kendaraan Truck Roda 6	2 Unit
6	Forklift	2 Unit
7	Crane Truck	1 Unit
8	DII.	





Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



KERAGAAAN OPERASIONAL PPN TERNATE





Potensi SDI WPPNRI 715, Produksi Tangkap dan Tingkat Pemanfaatan Ikan di Maluku Utara

Kelompok Ikan	Potensi (Ton)*2022	JTB (Ton)	Produksi 2024 (Ton)	Tingkat Pemanfaatan
CUMI CUMI	3.874	2.712	8.785,60	3,24
IKAN DEMERSAL	80.226	56.158	77.245,09	1,38
IKAN KARANG	105.336	52.668	41.861,24	0,79
IKAN PELAGIS BESAR*	74.908	52.436	20.746,08	0,40
IKAN PELAGIS KECIL	443.944	310.761	93.458,51	0,30
KEPITING	336	235	0,20	0,00
LOBSTER	1.217	609	6,18	0,01
RAJUNGAN	157	110	0,10	0,00
UDANG PENAEID	5.295	3.707	0,32	0,00
Total	715.293	479.396	242.103,32	0,51

*Ikan Pelagis Besar selain Tuna dan Cakalang
Produksi Tuna dan Cakalang 2024 : 76.631,31 ton



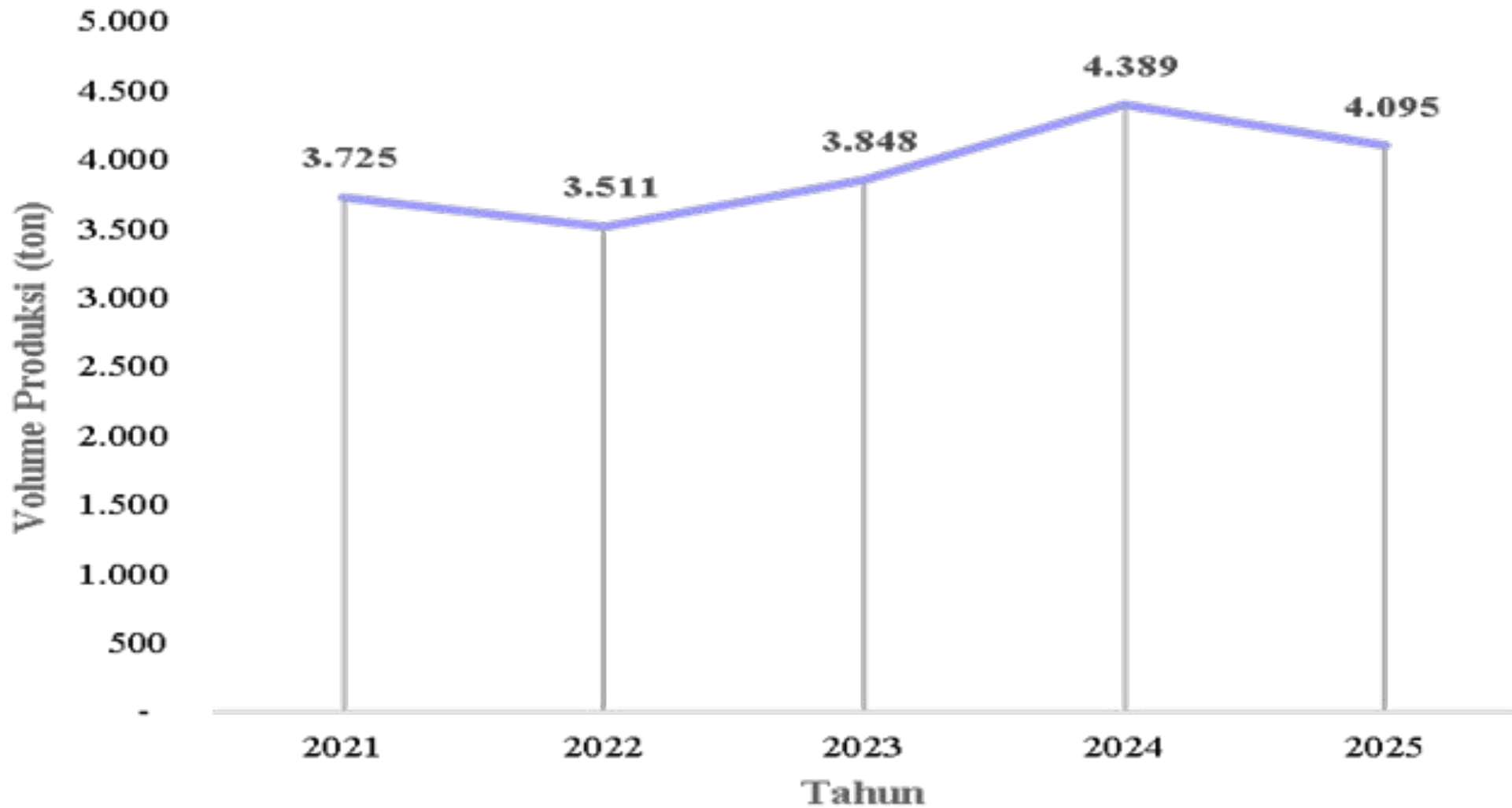
Tingkat Pemanfaatan SDI di PPN Ternate

Tahun	Produksi Maluku Utara (ton)	Produksi PPN Ternate (ton)	Tingkat Pemanfaatan
2020	319.925	4.519	0,014
2021	361.500	3.725	0,010
2022	356.982	3.511	0,010
2023	354.650	3.848	0,011
2024	318.734	4.389	0,014

Sumber: portaldata.kkp.go.id (2025)

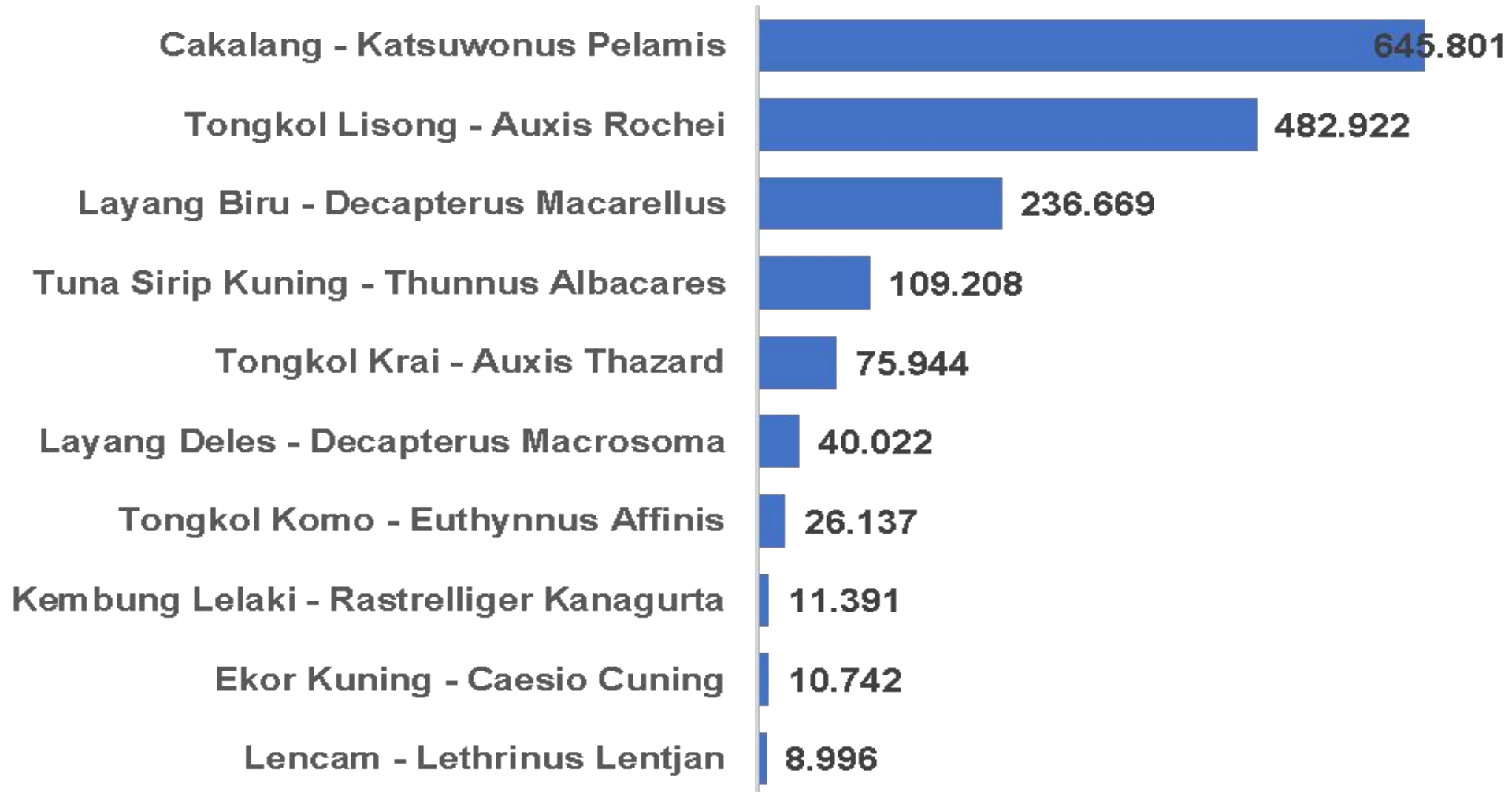


Volume Produksi Ikan PPN Ternate Tahun 2021-2025





Produksi (kg) 10 Jenis Ikan Teratas yang Didaratkan di PPN Ternate Tahun 2025





Data Logistik Perbekalan Melaut di PPN Ternate (2021 - 2025*)

No	Tahun	Jenis Perbekalan										
		Es	Air	Solar	Olie	Umpan	Bensin	Minyak Tanah	Beras	Gula	Minyak Goreng	Rokok
1	2021	3.815.400	3.124.491	1.214.634	13.348	-	46.833	36.015	36.510	9.775	8.706	4.819
2	2022	1.767.078	2.253.260	622.857	12.469	325.944	60.040	60.967	34.440	7.778	6.782	4.698
3	2023	2.792.300	2.328.302	822.991	15.630	315.146	60.491	64.701	33.550	7.546	6.896	5.415
4	2024	2.124.751	1.846.227	835.773	11.962	334.030	68.822	79.872	25.401	5.943	5.919	4.902
5	2025	1.469.558	1.058.772	743.073	65.165	145.842	61.932	48.590	16.185	3.349	3.571	2.769
Total		11.969.087	10.611.052	4.239.328	118.574	1.120.962	298.118	290.145	146.086	34.391	31.874	22.603

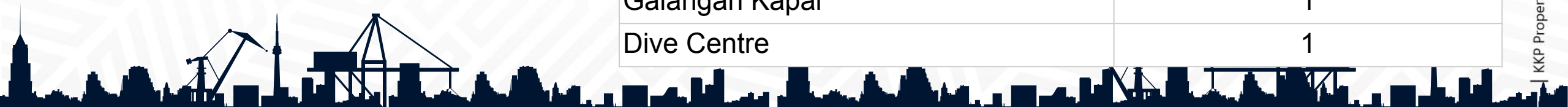


Sebaran Pelaku Usaha dan Jenis Usaha

Yang Beraktifitas Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate



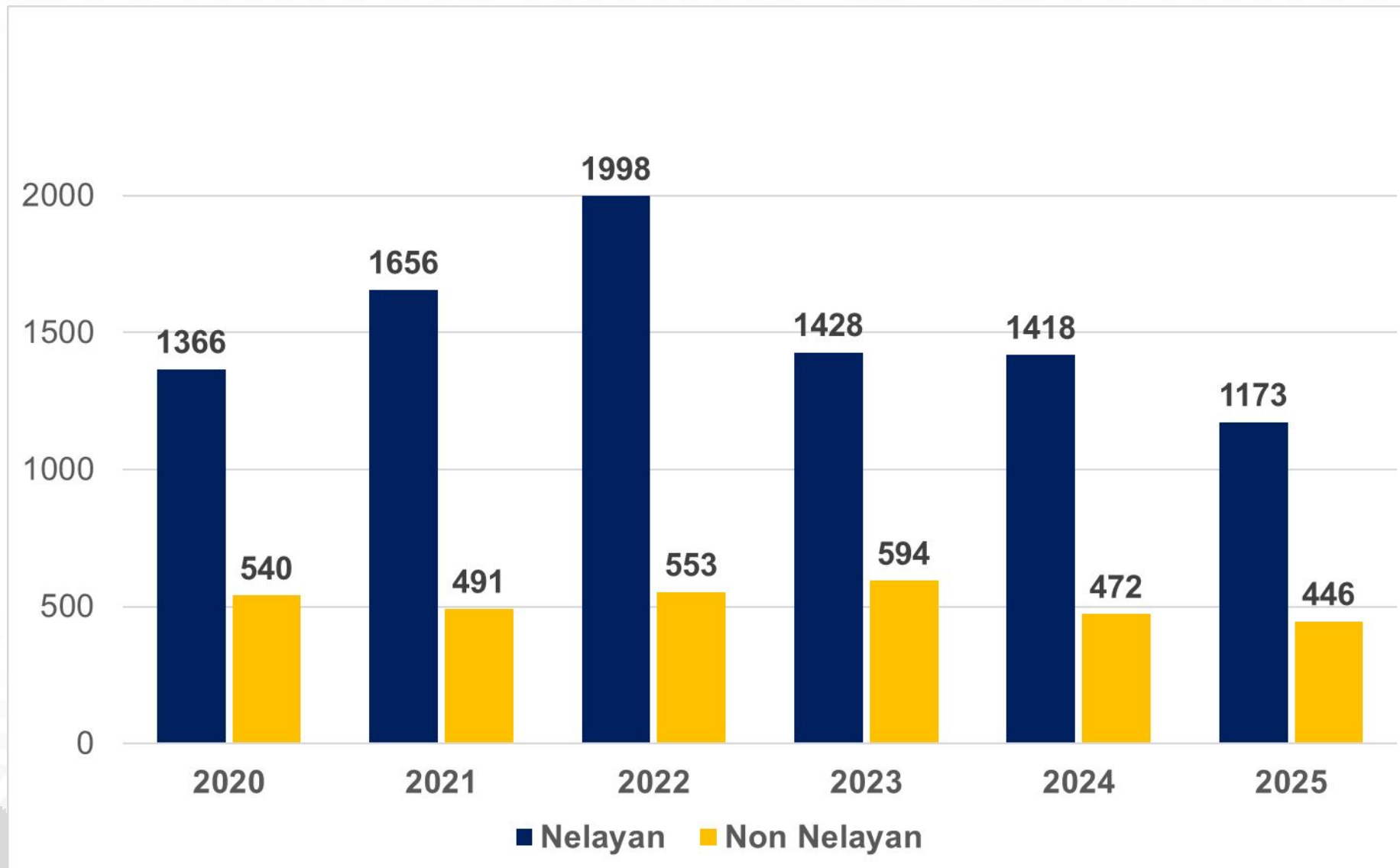
Kategori Jenis Usaha	Jumlah
Pengepakan dan Pemasaran Ikan	11
Pembekuan Ikan	6
UPI Tuna Loin	4
Kios Sembako/Rumah Makan	4
Pengasapan Ikan	3
Pemasaran Produk Hasil Perikanan	3
Pabrik Es	3
Penyediaan Perlengkapan Kapal Perikanan	2
SPDN	1
Jasa Keuangan	1
Galangan Kapal	1
Dive Centre	1





Jumlah Tenaga Kerja

Yang Beraktifitas Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2020-2024



**Peredaran Uang Tahun 2025 di
PPN Ternate
Sebesar :
± Rp. 217.104.879.094**





Analisis SWOT Peluang Investasi di PPN Ternate

Strength (Kekuatan)

- Potensi SDI di Maluku Utara yang melimpah
- Fasilitas pelabuhan yang cukup memadai
- Lokasi pelabuhan yang strategis
- Iklim usaha yang kondusif di dalam pelabuhan

Weakness (Kelemahan)

- Masih terbatasnya industri pengolahan ikan di PPN Ternate.
- Pemanfaatan lahan industri yang belum optimal
- Keterbatasan anggaran APBN untuk pengembangan pelabuhan

Opportunity (Peluang)

- Tingkat konsumsi hasil perikanan di Maluku Utara yang cukup tinggi
- Hilirisasi dan industrialisasi hasil perikanan
- Modernisasi armada penangkapan
- Potensi pasar hasil perikanan dari Maluku Utara baik nasional dan ekspor masih tinggi

Threads (Tantangan/Ancaman)

- Belum memadainya infrastruktur untuk mendukung ekspor hasil perikanan secara langsung dari Maluku Utara.
- Pada musim puncak penangkapan ikan fasilitas rantai dingin tidak mampu menampung hasil tangkapan.

- **Strategi: Meningkatkan investasi dan peran swasta dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas di PPN Ternate**

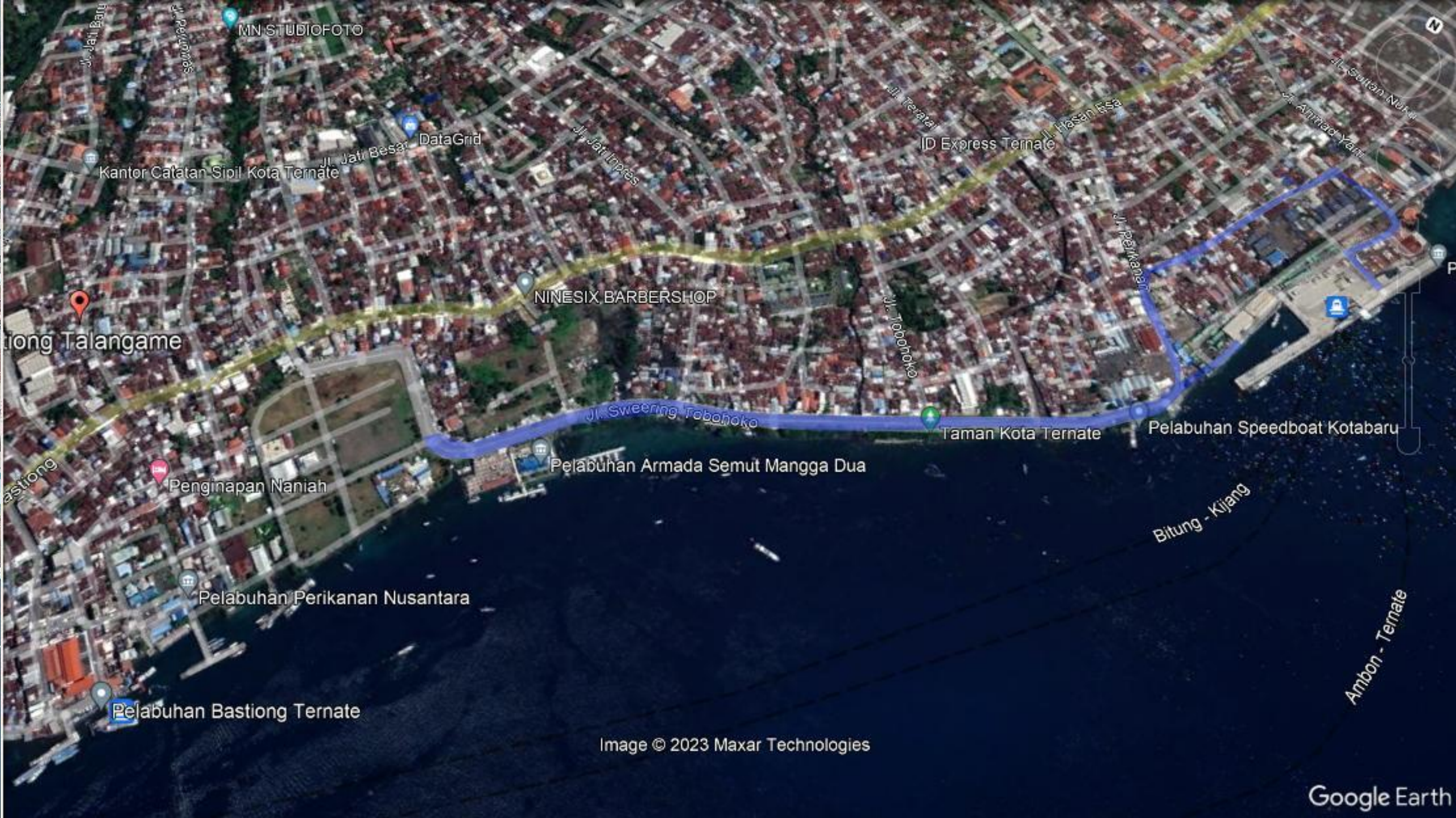


Image © 2023 Maxar Technologies

Google Earth



Terima Kasih





Audiensi KADIN INDONESIA KOMITE TIONGKOK (KIKT) HOTEL GWE, TERNATE



28 APRIL 2026

PPN Ternate menghadiri audiensi dengan Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) di Hotel Gwen Ternate



PPN Ternate
PPN Ternate





Audiensi ini turut dihadiri Dr. Graal Taliawo, anggota Komite II DPD RI Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Ternate.

Dalam pertemuan tersebut, Plh. Kepala PPN Ternate memaparkan potensi besar perikanan tangkap Mulai dari volume produksi, jenis komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol, hingga kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanan untuk mendukung rantai pasok ekspor.



KIKT menyambut positif peluang kerja sama ini. Sebagai jembatan pengusaha Indonesia dan Tiongkok, KIKT membuka akses pasar, investasi, serta transfer teknologi pengolahan hasil laut agar memenuhi standar ekspor.

Audiensi ini menjadi langkah awal penajajaran kerja sama konkret untuk mendorong hilirisasi perikanan dan membuka keran ekspor langsung dari Ternate ke Tiongkok.